

Renungan Hari Bhayangkara 2010

MARI MENGEVALUASI



OLEH: NETA S PANE

Ketua Presidium Indonesia Police Watch

MEMBANGUN kepercayaan masyarakat itulah harapan Polri. Harapan ini dituangkan dalam program jangka pendek Grand Strategi Polri. Sayangnya, hingga berakhirnya batas waktu program tersebut, yakni 2010, Polri tak kunjung mampu membangun kepercayaan masyarakat. Kesan negatif masyarakat pada Polri masih berkembang dan menggerogoti citra korps baju coklat ini.

Pada Hari Bhayangkara 2010 ini sudah saatnya jajaran Polri merenungkan dan mengevaluasi, sejauhmana Grand Strategi 2005-2025 nya itu berjalan efektif. Untuk kemudian mencari tahu dimana kendala sesungguhnya.

Secara konseptual Grand Strategi Polri 2005-2025 sangat ideal. Apalagi Polri membaginya dalam tiga tahap, yakni program jangka pendek 2005-2010 diberi nama Trust Building (membangun kepercayaan), jangka menengah 2010-2015 partnership/networking (kerjasama dan jaringan kerja), jangka panjang 2015-2025 strive for excellence.

Inti dari ketiga program Grand Strategi itu adalah Trust Building. Ia menjadi dasar dan landasan bagi Polri untuk melangkah serta menapak proses reformasi pasca pisah dari TNI. Sebab itu, periode ini memiliki

nilai strategis dan sekaligus juga masa kritis dalam rangka memantapkan organisasi yang kuat bagi Polri. Dari periode ini pula dapat dinilai sejauh mana kemampuan jajaran Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sekaligus penegak hukum yang dipercaya masyarakat.

Berhasil tidaknya program jangka pendek ini tentu sangat menyangkut berbagai bidang, yang meliputi bidang personel, materil, fasilitas dan jasa, pengembangan sistem dan yang tak kalah penting adalah metode serta pengawasan. Sangat sulit bagi Polri untuk melangkah ke tahap partnership maupun strive for excellence, jika tidak berhasil menjalankan program trust buildingnya.

EMPAT KENDALA

Salah satu pencapaian yang bisa diraih Polri dalam program trust buildingnya adalah melalui konsep kemitraan. Dalam era Kapolri Jenderal Sutanto, konsep kemitraan yang dibangun Polri melalui program Polmas (community policing) memang diharapkan menjadi salah satu strategi Polri untuk membangun citranya pasca pisah dari TNI. Namun terlalu banyak kendala yang dihadapi aparat kepolisian. Jajaran Babinkamtibmas yang menjadi ujung tombak Polmas dalam membangun kemitraan tersebut seakan tak berdaya menghadapi situasi ini. Setidaknya ada empat kendala yang membelenggu mereka.

Pertama, terbatasnya anggaran yang diberikan Polri untuk menjalankan program Polmas dan kemitraan tersebut.

Kedua, kurang diperhatikannya tindaklanjut pengaduan masyarakat binaan Polmas, sehingga hal ini kerap mengganggu proses kemitraan yang sedang dibangun aparat Polmas di lapangan. Pada gilirannya hal ini menciptakan krisis kepercayaan masyarakat terhadap petugas Babinkamtibmas yang menjadi ujung tombak Polmas.

Ketiga, terbatasnya akses anggota Babinkamtibmas yang menjadi ujung tombak Polmas ke lembaga internalnya (polesek, polres, polda).

Akibatnya, setiap perkembangan dan setiap pengaduan yang disampaikan masyarakat binaannya sulit ditindaklanjutnya ke tingkat yang lebih tinggi.

Keempat, masih tingginya krisis kepercayaan masyarakat terhadap anggota Polri, terutama aparat yang menjadi ujung tombak Polmas. Akibatnya, aparat yang menjadi ujung tombak Polmas tersebut kesulitan membangun konsep-konsep kemitraan di dalam masyarakat yang menjadi binaannya.

Fakta-fakta inilah menjadi kendala akut bagi Polri dalam membangun proses kemitraan dengan masyarakat. Buruknya proses kemitraan tersebut membuat jajaran kepolisian makin kesulitan dalam mendeteksi potensi-potensi kerawanan di tengah-tengah masyarakat. Jadi jangan heran, jika di pusat ibukota Negara, Jakarta pun gampang sekali terjadi amuk massa. Bahkan amuk massa itu seakan sangat sulit untuk dikendalikan hingga kemudian jatuh korban jiwa dan musnahnya harta benda masyarakat.

AMUK MASSA

Dari pendataan yang dilakukan Indonesia Police Watch, dalam tahun 2010 ini ada dua peristiwa amuk massa di seputar ibukota Jakarta. Pertama, pada 14 April 2010, terjadi bentrokan berdarah antara masyarakat dengan petugas Satpol PP yang hendak mengusur makam Mbah Priok di kawasan Koja, Jakarta Utara. Kedua, pada 31 Mei 2010 terjadi amuk massa di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Kerusuhan yang dipicu tewasnya anggota kelompok organisasi massa ini mengakibatkan puluhan lapak pedagang dan sejumlah kendaraan hangus terbakar.

Keterangan dari kepolisian dijelaskan bahwa dari awal kesalahan ada di pihak Pemda yang memaksakan penertiban, padahal sudah diingatkan penanganan harus secara persuasive. Bahkan Pemda dan Satpol PP malah melakukannya dengan kekerasan terhadap penghuni makam. Juga sudah diperintahkan untuk menghentikan dan melakukan evakuasi namun tak dilakukan sehingga akhirnya mendapat serangan dari massa cair

TRUST BUILDING POLRI

yang datang dari luar makam. Intinya, pihak kepolisian sudah berbuat maksimal untuk mencegah terjadinya banyak korban meninggal, namun tak dihiraukan. Maka terjadilah peristiwa tragis itu.

Fakta ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim kajian PMI Jakarta atas perintah Gubernur DKI atas kasus tersebut. Dari hasil penelitian di lapangan diperoleh fakta bahwa memang telah terjadi kesalahan penanganan di lapangan serta arogansi petugas Satpol PP menjadi pemicu terjadinya amuk massa tersebut.

Dan--semua pihak pasti menyesalkan terjadinya bentrokan berdarah di dua kawasan di ibukota Jakarta tersebut. Namun yang memprihatinkan amuk massa di Koja itu terjadi akibat penanganan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP DKI Jakarta terlalu arogansi sehingga korban pun berjatuhan.

Di Cengkareng, amuk massa berawal dari tewasnya Endit Mawardi (43), salah seorang pimpinan organisasi

massa. Mendengar kabar ini anggota ormas yang dipimpin Endit pun mencari para pelaku yang diduga berasal dari etnis tertentu di daerah Duri Kosambi. Massa kemudian melakukan pembakaran. Sebanyak 35 lapak pedagang kayu dan beberapa kendaraan hangus terbakar.

Kedua kasus ini, sekalipun bukan kesalahan pihak kepolisian, namun tetap merupakan pukulan telak bagi jajaran kepolisian di tengah-tengah korps baju coklat itu gencar-gencarnya mengkampanyekan program Polmas (community police) dan quick wins (quick respon). Dan kian tragis karena terjadi di Jakarta, ibukota negara. Bagaimana pun, kasus amuk massa tadi, terutama yang terjadi di Koja dan Cengkareng, tetap patut menjadi bahan renungan dan introspeksi jajaran kepolisian, untuk kemudian mengevaluasi kinerja aparaturnya atas konsep-konsep kerja yang sudah digariskan. Artinya, sudah sejauhmana konsep Polmas diterapkan, sudah sejauhmana konsep quick respon dipahami jajaran bawah kepolisian,

dan sudah sejauhmana konsep-konsep kemitraan dilaksanakan?

Meletusnya amuk massa, khususnya di ibukota negara, menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan konsep kemitraan yang dibangun Polri selama ini. Bagaimanapun potensi konflik, terutama amuk massa bisa dengan cepat diantisipasi, jika konsep kemitraan antara polisi dan masyarakat terlaksana dengan sempurna. Setidaknya, masyarakat yang menjadi mitra polisi dapat dengan cepat memberikan informasi kepada jajaran kepolisian tentang adanya ancaman konflik. Sehingga polisi dengan cepat dapat mengambil langkah-langkah antisipasi. Misalnya, dengan cara menghubungi tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi mitranya, untuk segera turun tangan membantu polisi menenangkan warga yang akan berkonflik atau melakukan amuk.

MASYARAKAT MADANI

Kasus amuk massa yang sepertinya tidak terkendali secara dini itu patut menjadi pelajaran bagi jajaran Polri



umumnya dan Polda Metro Jaya khususnya. Bagaimana pun kasus ini bisa menjadi preseden. Masyarakat akan menilai, di pusat ibukota saja polisi lengah dan tidak profesional, bagaimana lagi jika di daerah terpencil. Dengan kata lain, dalam era reformasi dimana masyarakat memasuki masa transisi menuju masyarakat madani, Polri memang harus mampu menekan seminimal mungkin "kelengahannya".

Sebab, dalam masa transisi sekarang ini Polri menghadapi berbagai masalah yang kompleks, yang apabila penanganannya tidak profesional akan menjadi bumerang bagi Polri sendiri. Bukan tidak mungkin dapat menimbulkan masalah baru. Apalagi jika aparat Polri di lapangan lebih mengedepankan kekerasan, kecaman yang bertubi-tubi pun akan berdatangan. Hingga membuat Polri seperti dihadapkan pada situasi yang serba salah.

Semua ini tak bisa dihindari Polri. Soalnya masyarakat masih menyaksikan sikap-sikap negatif dari sebagian anggota kepolisian. Seperti kekerasan yang dilakukan oleh petugas kepolisian di lapangan, salah prosedur, salah tembak, maraknya penyalahgunaan narkoba, konflik antar suku bangsa maupun perkelahian antar warga masyarakat yang tidak tuntas penanganannya, kenakalan remaja, terorisme, kejahatan kerah putih, ketidaknetralan petugas kepolisian dalam menyelesaikan konflik dan lainnya, semua menimbulkan isu yang kontroversial dan sangat menyudutkan

Polri.

Tragisnya, di tengah sikap serba salah jajaran Polri, masyarakat terus menerus menuntut adanya pelayanan prima dan adanya perubahan yang signifikan dalam melaksanakan pemolisianannya. Kompleksnya masalah yang dihadapi Polri untuk menuju polisi sipil dalam masyarakat modern dan demokratis ini hanya dapat dilaksanakan dengan sikap profesional dan kemampuan yang profesional aparatnya. Profesionalisme Polri hanya bisa dilakukan dengan memberikan pengetahuan, pengetahuan konseptual dan teoritikal mengenai berbagai permasalahan sosial dan kepolisian. Untuk mengetahui semua ini jajaran Polri harus pula mampu memahami denyut kehidupan sosial di masyarakat. Jajaran Polri harus terus menerus memahami dinamika masyarakatnya.

Ini patut dilakukan Polri. Sebab seiring dengan proses demokratisasi pada lingkungan masyarakat madani (civil society), warga masyarakat, termasuk LSM, akan terus menerus mengontrol jalannya pemerintahan dan negara, termasuk kepolisian. Tujuannya untuk menjamin terlindunginya kepentingan dan hak-hak masyarakat. Realitas kedaulatan rakyat dalam bingkai demokrasi inilah yang perlu disikapi secara konseptual dan profesional oleh Polri. Sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran yang strategis serta dapat diimplementasikan oleh aparat kepolisian di lapangan. Hal ini mengingat bahwa pelayanan yang harus disajikan Polri, memiliki cakupan

yang sangat luas dan menyentuh jiwa, harta benda, kebebasan, kemerdekaan, dan hak asasi manusia, serta kebutuhan administrasi kewargan yang dikelola oleh Polri.

Cakupan kerja Polri yang luas ini pada dasarnya mengandung limpahan mandat dari masyarakat kepada kepolisian, yang senantiasa harus dijaga dengan baik oleh jajaran kepolisian, karena memiliki makna bahwa masyarakat menaruh kepercayaan kepada Polri untuk melakukan tugas-tugasnya demi kepentingan masyarakat. Persoalannya, bagaimana jajaran Polri mau menyikapi pemberian kepercayaan dari masyarakat ini?

KATALISATOR

Sejumlah negara demokratis sudah mengubah sistem pemolisianannya. Penekanan yang dilakukan adalah mengarahkan lembaga kepolisian melahirkan anggota polisi yang profesional, dengan pendekatan selalu berusaha memahami keinginan masyarakat. Dengan pendekatan ini diharapkan masyarakat dapat mencintai, simpati, membutuhkan, dan mempunyai ketergantungan yang kuat terhadap keberadaan polisi. Dengan demikian lembaga kepolisian semakin mudah meningkatkan kinerja dan sikap profesionalitasnya.

Hasil penelitian David Bayley di lima negara AS, Inggris, Kanada, Jepang, dan Australia (lihat buku *Police for The Future*) menyimpulkan bahwa kelima negara tersebut mengutamakan kesatuan kepolisian yang dekat dengan masyarakat. Negara maju tersebut mengedepankan penerapan pemolisian komuniti sebagai alternatif gaya pemolisian yang berorientasi pada masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah di dalam masyarakat itu sendiri.

Dalam hal ini polisi hanya sebagai katalisator atau sebagai fasilitator yang bersama-sama dengan masyarakat di lingkungannya berupaya untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Sistem pemolisian modern ini dinilai lebih dapat mengantisipasi dinamika masyarakat yang berkembang demikian cepat dan sulit diprediksi, dengan kompleksitas yang tinggi. Jika pola ini diterapkan Polri akan lebih cepat meraih hasil dari Grand Strategy-nya, terutama dalam meraih hasil dari program trust building-nya. Semoga saja. Dirgahayu Polri.





REFORMASI BIROKRASI POLRI

MENUJU 'TATANAN BARU

